

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam, budaya serta laut yang luar biasa. Indonesia menurut *United nations environment program – UneP (2003)* dalam kementrian Pekerjaan umum (2012) menyatakan memiliki luas wilayah 7,9 juta km dimana luas wilayah perairan mencapai 77% dari luas wilayah Indonesia. Luas perairan terbagi atas laut territorial seluas 3,2 juta km dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,9 juta km. Melihat kondisi geografis tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar serta merupakan asset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui industri perikanan. Hal tersebut dapat ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia saat ini telah ditopang dengan berbagai kebijakan, progam dan kegiatan pembangunan disektor kelautan maupun perikanan, salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan adalah dengan menerapkan kebijakan konsepsi Minapolitan. Minapolitan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 12 tahun 2010 adalah pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Penetapan Kawasan Minapolitan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 32 tahun 2010 tentang Penetapan

Kawasan Minapolitan mencakup 197 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan. Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksudkan pada *dictum* pertama dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai 2014. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tentang penetapan Kawasan Minapolitan. Perubahan keputusan penetapan Kawasan Minapolitan diatur pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 39 tahun 2011 tentang Perubahan Jumlah Penetapan Kawasan Minapolitan, jumlah daerah Kawasan Minapolitan berubah dari 197 Kabupaten/Kota menjadi sebanyak 223 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan Minapolitan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Minapolitan. Kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan seyogyanya harus memperhatikan masalah, kebutuhan, dan potensi untuk selanjutnya dirumuskan suatu kebijakan yang tertuang dalam visi misi atau rencana strategis. Di dalam sebuah pembangunan yang perlu dilakukan adalah memprioritaskan pembangunan sesuai potensi yang dimiliki baik daerah maupun nasional. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah memiliki kompleksitas tersendiri baik dari segi permasalahan maupun sumberdaya.

Minapolitan sekarang menjadi prospek baik bagi industri perikanan maupun kelautan dengan sektor unggulan produksi perikanan. Pembangunan ekonomi kelautan sudah selayaknya di kelola dengan baik dan optimal untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mengantarkan bangsa

ini menjadi makmur, adil, dan sejahtera. Menurut Daryanto sebagaimana yang dikutip oleh Ulum (2013) menyatakan bahwa:

“Sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya penting bagi hajat hidup masyarakat yang bisa dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa: *pertama*, besarnya potensi perikanan Indonesia, baik ditinjau dari kualitas maupun diversitas. *Kedua*, Industri disektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakat wilayah disekitarnya. *Ketiga*, perikanan Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang tinggi”.

Berbagai sektor yang dapat dikembangkan dalam sektor perikanan ialah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan.

Salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Minapolitan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 39 tahun 2011 tentang Perubahan Jumlah Penetapan Kawasan Minapolitan, adalah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan konsep Minapolitan harus disesuaikan dengan tujuannya, yaitu peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Seluruh program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengarah pada sasaran dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Program Nasional Minapolitan. Oleh karena itu diperlukanya Perencanaan strategis, serta kebijakan yang inovatif dengan terobosan yang efektif. Tentu saja dalam hal ini di perlukan pemikiran dan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan kelautan dengan gerakan yang mendasar dan cepat sesuai nilai-nilai Revolusi biru.

Minapolitan dalam sebuah perencanaan yaitu pengalokasian sumberdaya, dimana optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, manusia dan anggaran. Dalam perencanaan pembangunan, perencanaan adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan, yang mengacu pada permasalahan dan sumberdaya yang kompleks. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah, lingkungan, dalam suatu wilayah atau daerah dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, serta sesuai pada azas prioritas. Minapolitan sebagai konsep perencanaan sangat cocok dalam rangka pembangunan, dimana Minapolitan memiliki relevansi pemahaman tentang Perencanaan Pembangunan.

Di dalam perencanaan pembangunan Minapolitan menjadi wilayah pengembangan dengan pendekatan pembangunan sektoral dimana pendekatan tersebut akan memudahkan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai dan menetapkan alokasi anggaran, dimana kebijaksanaan pembangunan dengan pendekatan perwilayahan akan mendatangkan banyak manfaat. Menurut Sumarmi, (2012:75) manfaat pendekatan perwilayahan dalam pembangunan meliputi;

“yang pertama ialah mengenai modal dasar/potensi yang dimiliki setiap wilayah daerah tersebut. Kedua, mewujudkan pemerataan pertumbuhan dan keseimbangan perkembangan wilayah dapat dilakukakan dengan kondisi/potensi sumberdaya alam, SDM, sumberdaya buatan dan aspek kelembagaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya dari setiap daerah dapat diukur secara teliti dan benar sebagai dasar menetapkan kebijakan keterpaduan pengembangan wilayah secara berkala (tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang). Ketiga, usaha mewujudkan point kedua di atas terlaksana. Keempat, dalam perkembangan dan pertumbuhan daerah (secara struktur, sosial, dan ekonominya) akan ditentukan oleh potensi

sumber daya alam (terutama kawasan budidaya), sumberdaya manusia, kelembagaan.”

Konsep Minapolitan merupakan konsep yang ditawarkan oleh Friedman dan Douglas. Menurut Friedman dan Douglas dalam Anugrah (2003) Kawasan Minapolitan di dalamnya terdapat konsep pola interaksi yang terdiri dari;

1. Penetapan pusat Agropolitan/Minapolitan
2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan.
3. Penetapan sektor unggulan.
4. Dukungan system infrastruktur.
5. Dukungan system kelembagaan

Konsep Minapolitan dikembangkan sebagai siasat baru pembangunan daerah sebagai konsep yang diaplikasikan untuk menghindari ketimpangan yang terjadi saat ini, konsep Minapolitan ini mengacu pada konsep Agropolitan. Dengan adanya konsep pola interaksi diatas diharapkan meningkatkan nilai tambah (*Value added*) produksi kawasan Minapolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan. Konsepsi Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 32 tahun 2010, kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, terdapat 179 Kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.

**Tabel 1. Kawasan Minapolitan di Indonesia**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
1	Aceh	6	2	6
2	Sumatera Utara	5	4	2
3	Sumatera Barat	7	2	5
4	Riau	9	3	5
5	Kepulauan Riau	6	-	1
6	Jambi	1	2	3
7	Sumatera Selatan	5	2	9
8	Kepulauan Bangka Belitung	5	4	2
9	Bengkulu	5	-	5
10	Lampung	5	-	5
11	DKI Jakarta	4	1	-
12	Jawa Barat	1	3	5
13	Banten	7	1	3
14	Jawa Tengah	15	3	13
15	DI Yogyakarta	4	-	4
16	Jawa Timur	14	6	12
17	Bali	2	3	4
18	Nusa Tenggara Barat	5	1	5
19	Nusa Tenggara Timur	5	1	6
20	Kalimantan Barat	3	2	1
21	Kalimantan Tengah	7	2	4
22	Kalimantan Selatan	3	1	4
23	Kalimantan Timur	4	-	3
24	Sulawesi Utara	11	2	6
25	Gorontalo	2	2	2
26	Sulawesi Tengah	7	-	4
27	Sulawesi Selatan	5	1	10
28	Sulawesi Barat	6	-	2
29	Sulawesi Tenggara	7	1	6
30	Maluku	3	2	1
31	Maluku Utara	5	4	3
32	Papua	2	-	2
33	Papua Barat	3	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>179</b>	<b>57</b>	<b>145</b>

Sumber: *Pengembangan Kawasan Minapolitan* Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013)

Kabupaten Gresik berada pada  $7^{\circ}$  -  $8^{\circ}$  Lintang selatan dan  $112^{\circ}$  -  $113^{\circ}$  Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 - 12 m di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Panceng dengan ketinggian 25 M dari permukaan laut. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km<sup>2</sup> (Gresik Dalam Angka, 2015:3). Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 140 km lepas pantai Laut

Jawa. Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah selatan. Bersama dengan Sidoarjo, Gresik merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Melihat kondisi geografis, Kabupaten Gresik memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan. Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, terdapat 14 kecamatan memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Gresik termasuk daerah kawasan minapolitan. Di Kabupaten Gresik, berdasarkan dokumen Pengembangan Kawasan Minapolitan tahun 2013 Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 4 Kecamatan yang termasuk dalam kawasan minapolitan, yaitu Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun

Sektor budidaya perikanan Kabupaten Gresik memiliki potensi untuk dapat dioptimalkan. Hal ini di dukung dengan wilayah laut Kabupaten Gresik seluas 22% dari luas wilayah (Kabupaten Gresik Dalam Angka 2015). Budidaya perikanan di Kabupaten Gresik memiliki potensi yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2013 Kabupaten Gresik jumlah produksi budidaya perikanan Kabupaten Gresik sejumlah 99.790,27 Ton, menempati peringkat ke-2 setelah Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini minapolitan menjadi konsep pembangunan sektor kelautan dan

perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan unggulan penghasil komoditas ekspor produk kelautan dan perikanan.

**Tabel 2. Produksi Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

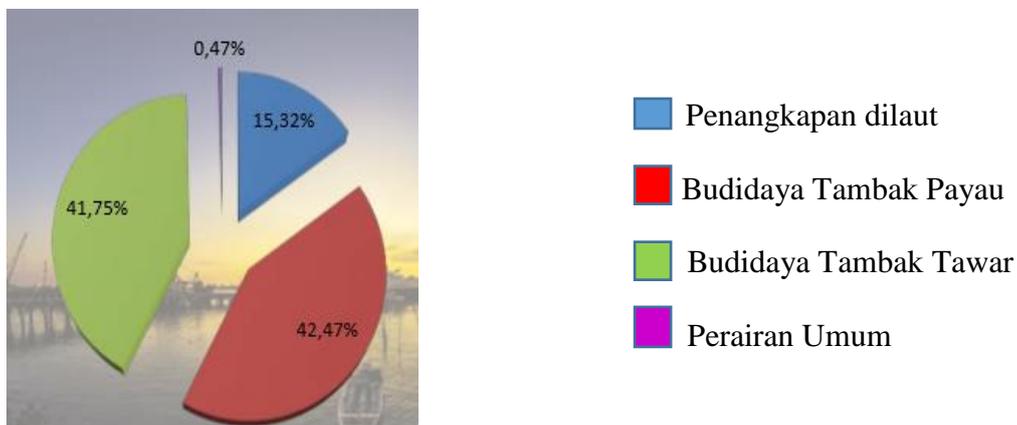
Kabupaten/Kota <i>District</i>	SUB SEKTOR PERIKANAN							
	Jumlah Total	BUDIDAYA						
		Laut	Tambak	Kolam	Sawah tambak	Mina padi	Karamba	Japung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jumlah</b>	995.996,26	580.683,02	177.077,11	124.621,25	92.540,70	7.968,22	345,62	12.726,35
<b>Sub jumlah 1</b>	858.036,94	570.961,51	162.656,72	22.872,21	92.537,80	7.512,25	187,82	1.308,63
Tuban	20.821,01	-	4.432,13	704,91	7.051,40	7.499,76	147,81	-
Lamongan	39.201,37	-	3.951,08	1.569,62	33.976,20	12,49	39,16	12,92
Gresik	99.790,27	492,00	47.895,18	353,69	51.049,40	-	-	-
Kota Surabaya	8.098,25	-	6.906,91	1.044,13	-	-	-	147,21
Bangkalan	936,59	43,00	697,16	170,78	10,80	-	-	14,85
Sampang	3.054,24	1,34	2.745,73	289,75	-	-	-	17,42
Pamekasan	2.154,80	267,91	1.582,24	304,35	-	-	-	-
Sumenep	571.059,69	569.789,77	1.105,43	164,49	-	-	-	-
Sidoarjo	89.174,40	-	73.624,50	15.549,90	-	-	-	-
Pasuruan	14.124,96	-	11.323,93	1.689,16	-	-	-	1.111,87
Kota Pasuruan	67,98	-	663,91	14,12	-	-	0,95	-
Probolinggo	573,53	267,64	4.737,33	359,19	-	-	4,90	4,47
Kota probolinggo	668,45	-	273,47	394,98	-	-	-	-
Situbondo	3.440,40	99,85	3.077,41	263,14	-	-	-	-
<b>Sub jumlah 2</b>	137.925,33	9.721,51	14.420,39	101.749,04	2,90	455,97	157,80	11.417,72
Banyuwangi	23.436,91	9.141,51	11.191,73	3.002,48	-	31,43	69,77	-
Jember	5.970,50	-	726,50	5.235,40	-	8,60	-	-
Lumajang	2.461,05	-	667,54	823,45	-	-	9,90	960,16
Malang	17.070,16	-	982,00	5.821,82	-	23,31	-	10.243,03
Blitar	9.429,41	-	499,50	8.805,35	-	6,36	-	118,20
Tulungagung	25.138,76	-	230,54	24.098,22	-	-	-	-
Trenggalek	2.744,44	-	-	-	2.744,44	-	-	-
Pacitan	1.283,94	580,00	122,59	581,36	-	-	-	-
Magetan	937,86	-	-	935,10	-	-	-	2,76
Ponorogo	2.362,75	-	-	2.325,00	-	-	-	37,75
Ngawi	1.725,80	-	-	1.706,38	-	-	-	19,42
Bojonegoro	2.265,42	-	-	1.927,71	-	337,71	-	-
Nganjuk	11.202,90	-	-	11.184,30	2,90	4,10	4,00	7,60
Madiun	2.461,41	-	-	2.461,61	-	-	-	-
Kota Madiun	105,51	-	-	105,51	-	-	-	-
Jombang	15.552,80	-	-	15.551,30	-	-	1,50	-
Kediri	11.586,64	-	-	11.558,71	-	15,45	12,49	-
Kota Kediri	138,54	-	-	137,34	-	-	1,20	-
Mojokerto	393,04	-	-	340,93	-	-	23,32	28,80

Kota Mojokerto	184,42	-	-	184,42	-	-	-	-
Kota Malang	39,69	-	-	37,46	-	-	2,23	-
Kota Blitar	168,18	-	-	168,18	-	-	-	-
Bondowoso	1.210,65	-	-	1.51,06	-	29,01	30,58	-
Kota Batu	54,56	-	-	51,74	-	-	2,82	-

Sumber: *Statistik Perikanan Budidaya 2013*, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Dari sajian data tabel di atas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi laut serta perikanan budidaya yang melimpah, sehingga berpeluang menjadi sumber produksi komoditi ekspor.

Produksi perikanan Kabupaten Gresik pada Tahun 2014 mencapai 113.464,18 ton (Gresik Dalam Angka Tahun 2015). Disamping hasil tangkapan laut produksi perikanan juga dihasilkan dari budidaya dan pemeliharaan perikanan darat yang meliputi tambak, kolam dan perairan umum. Produksi perikanan yang terbesar adalah dari budidaya di tambak payau sebesar 48.185,01 ton atau sebesar 42,47 persen, sedangkan yang terkecil adalah produksi budidaya di perairan umum hanya sebesar 528,53 ton (Gresik Dalam Angka Tahun 2015). Kecamatan Manyar, Duduk- sampeyan, dan Bungah merupakan daerah perikanan terbesar di Kabupaten Gresik.



**Gambar 1. Produksi Ikan Menurut Subsektor Perikanan**

Sumber: *Gresik Dalam Angka Tahun 2015*

Konsepsi Minapolitan dilaksanakan, khususnya di Kabupaten Gresik dengan tujuan mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Di Kabupaten Gresik, minapolitan berfokus pada sektor budidaya perikanan. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan tanggal 22 Januari 2016, menurut bapak AK (L : 46th), bidang perikanan seksi perikanan budidaya, Kabupaten Gresik masih memiliki permasalahan dalam pengembangan minapolitan ialah sinergitas antar lembaga atau Dinas terkait yang berperan dalam menjalankan Kawasan Minapolitan ini masih belum optimal. Permasalahan yang kedua ialah sumber daya manusia, yakni para petani ikan sebagai subjek maupun objek dalam konsep Minapolitan, memiliki pola pikir sendiri yang tidak sesuai arahan yang diberikan Dinas Terkait. Upaya pemerintah sendiri dalam memperbaiki sumber daya manusia sudah ada melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah, dengan harapan pola pikir petani tersebut menjadi lebih baik. Namun dalam pelaksanaan pelatihan yang telah dilakukan tidak semua petani tambak mengikuti, hanya beberapa petani yang ada pada kelompok petani ikan kelompok bernama POKDAKAN (kelompok pemuda ikan). Dari kelompok POKDAKAN tersebut diambil 5-10 orang guna mengikuti pelatihan dengan harapan beberapa petani yang mengikuti pelatihan tersebut, mampu membagi ilmu yang didapat selama pelatihan kepada petani yang lain sehingga dapat merubah pola pikir dalam memproduksi ikan secara sederhana yang telah dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya kurang adanya proteksi dari pemerintah tentang Minapolitan, maksud proteksi yaitu perlindungan kawasan Minapolitan dimana masih adanya pindah tangan kepemilikan lahan

kepada pihak investor yang tidak benar-benar dalam menjalankan proses perikanan, dimana lahan ini yang terdapat di lokasi Minapolitan dijadikan pihak investor sebagai gudang atau pabrik.

Dari penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perencanaan strategi pengembangan Minapolitan di Kabupaten Gresik, yang berjudul **Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi pada Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan strategis pemerintah daerah dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan?
2. Bagaimana peran stakeholder dalam Pengembangan Minapolitan?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rencana strategis pengembangan minapolitan di Desa Kemangi, Kecamatan bungah, Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran stakeholder dalam pengembangan minapolitan di Desa Kemangi, Kecamatan bungah, Kabupaten Gresik.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

## 1. Kontribusi akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang potensi daerah Minapolitan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis
- c. Memperkaya kajian keilmuan administrasi publik perencanaan pembangunan

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Tersedianya informasi mengenai potensi (sektor basis) di Kabupaten Gresik khususnya di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah.
- b. Sebagai dasar penentuan arah kebijakan ekonomi pemerintah daerah dalam menghadapi era otonomi daerah khususnya di Kabupaten Gresik.
- c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan yang akan datang berkaitan dengan pengembangan Minapolitan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan adalah mengulas tentang penyajian data, analisis data penelitian, dan interpretasi hasil analisis data penelitian

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran hasil penelitian diuraikan secara garis besar merupakan temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian, baik yang bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan pula implementasi dari hasil pembahasan, dan harus bersesuaian dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.